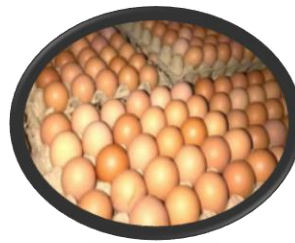


PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018 - 2023**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya jualah maka Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dan disusun guna menyediakan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 ini. Saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan yang lebih lanjut

Pangkajene Sidenreng, Juli 2021

KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL K

NIP. 19640317 199510 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2. Sumber Daya	17
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015-2019	20
2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 21. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018.....	17
Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	17
Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2018.....	18
Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018.....	21
Tabel 2.6. Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan	26
Tabel 2.7. Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan.....	27
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	29
Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang	31
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	33
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perikanan dan Kelautan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	36
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	37
Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	39
Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	40
Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	43
Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023.....	44
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.....	45
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2021	51
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 – 2023	61

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	77
--	----

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro, yang memuat visi, misi dan program prioritas serta rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor penyusunan program pembangunan.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sidenreng Rappang terpilih, dalam hal ini untuk bidang urusan peternakan dan perikanan terfokus pada misi II yaitu Memajukan Usaha Agribisnis, UKM serta Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Usaha Pertanian (agrondustri) dengan Penerapan Konsep Petik Olah Kemas dan Jual.

Tahapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: (1). Persiapan penyusunan;(2).Penyusunan rancangan awal;(3).Penyusunan rancangan; (4).Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;(5).Perumusan rancangan akhir; dan(6).Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program

prioritas dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Renstra Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Namun karena adanya berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non alam (Pandemi Covid-19), perubahan kebijakan nasional dan terbitnya peraturan perundangan baru maka perlu untuk dilakukan perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2018 – 2023, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipas Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2015, Nomor 7);

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang terutama yang terkait dengan urusan Peternakan dan Perikanan. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan selama periode tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.

Tujuan penyusunan perubahan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang peternakan dan perikanan;
2. Menjabarkan kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, dengan demikian maka dokumen perubahan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 -2023 disusun dengan sistematika seperti berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan renstra dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota serta dasar perubahan renstra

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumberdaya

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai jenis sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Peternakan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pemberi dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrtasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan,serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkungan dinas.

c. Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembibitan dan kesehatan hewan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembibitan dan kesehatan hewan.

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

c.1 Kepala Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi

Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pembibitan, pengelolaan pakan dan peningkatan produksi ternak.

c.2 Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner

Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat dan veteriner.

c.3 Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan hewan.

d. Kepala Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

d.1 Kepala Seksi Pengawasan dan Pembiayaan

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembiayaan.

d.2 Kepala Seksi Kelembagaan

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan penyuluh.

d.3 Kepala Seksi Penyuluhan

Tugas : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan.

e. Kepala Bidang Perikanan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Perikanan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perikanan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

e.1 Kepala Seksi Perikanan Budidaya

Tugas : Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya.

e.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan

Tugas : Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan.

e.3 Kepala Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan

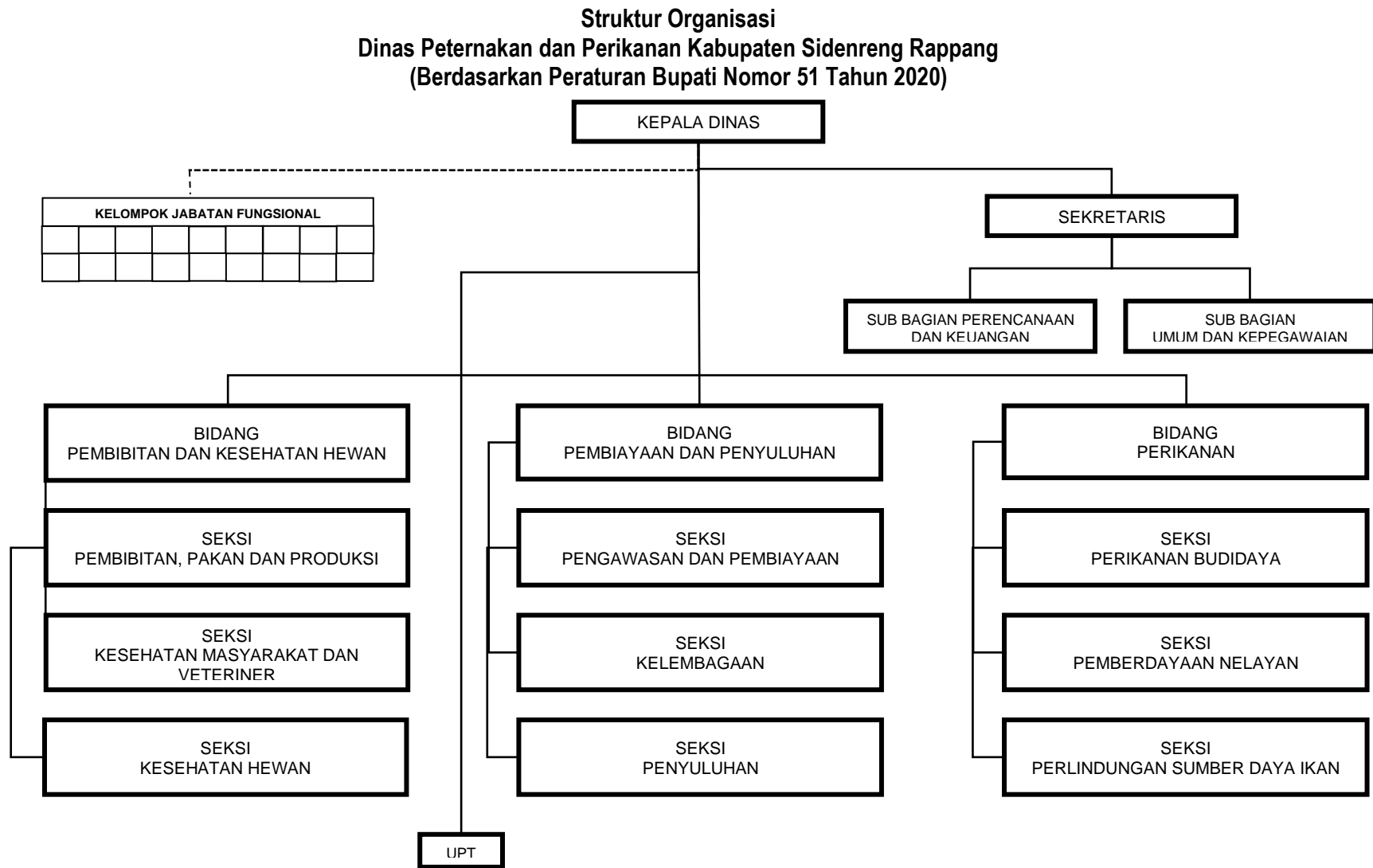
Tugas : Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perlindungan sumberdaya ikan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan
 - a. Seksi Pembibitan, Pakan dan Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner
 - c. Seksi Kesehatan Hewan
4. Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan
 - a. Seksi Pengawasan dan Pembiayaan
 - b. Seksi Kelembagaan
 - c. Seksi Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
 - a. Seksi Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan
 - c. Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan
6. Jabatan Fungsional



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.2. Sumberdaya

a. Pangkat dan Golongan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	1
2	Pembina Utama Muda, IV/c	4	1	5
3	Pembina Tk.I. IV/b	12	5	17
4	Pembina IV/a	15	14	29
5	Penata Tk. I, III/d	22	10	32
6	Penata, III/c	15	10	25
7	Penata Muda Tk.I, III/b	12	10	22
8	Penata Muda, III/a	5	3	8
9	Pengatur Tk. I, II/d	2	1	3
10	Pengatur, II/c	5	2	7
11	Pengatur Muda Tk. I, II/b	4	1	5
12	Pengatur Muda, II/a	1	1	2
13	Juru Tk I, I/d	1	-	1
	Jumlah	99	58	157

b. Tingkat Pendidikan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister (S.2)	13	10	23
2	Magister (S.1)	64	38	102
3	D.IV	10	3	13
4	D.III	1	2	3
5	SLTA	10	5	15
6	SLTP	1	-	1
		95	55	157

c. Eselon

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1	-	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	2	1	3
4	Eselon IV	5	6	11
5	Staf	55	42	97
6	Fungsional	30	14	44
		94	63	157

Selain personil aparatur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	TANAH		
	1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	APBD, Hibah
	2 Tanah Untuk Pengembangan Peternakan	4	
	3 Tanah Untuk Pengembangan Perikanan	5	
	4 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	PERALATAN DAN MESIN		
	1 Alat Angkutan		
	Kendaraan Roda 4	2	APBD
	Kendaraan Roda 2	155	
	Kendaraan Roda 3	5	
	Alat Angkut Air	1	
	2 Alat Bengkel dan alat Ukur		
	Termometer	6	
	3 Alat Peternakan/Perikanan		
	Alat Peternakan		
	Insemination Gun	10	
	Alat Perikanan		
	Keramba Jaring	3	
	4 Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Laptop	15	
	PC	6	
	Printer	9	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

	AC	4	
	Camera	12	
	Proyektor	2	
	Hardisc Eksternal	11	
	Handycam	1	
	Sound System	2	
	Wireless	1	
	Megaphone	0	
	Microphone	0	
	Reach In Freezer	7	
	Mesin Ketik Standar	3	
	Filling Besi	3	
	Brankas	1	
	Lemari Kaca	5	
	Lemari Kayu	7	
	Lemari Arsip	10	
	Meja Rotan	4	
	Meja Rapat	1	
	Kursi Rapat	1	
	Meja Kerja Eselon II	1	
	Meja Kerja Eselon III	4	
	Meja Kerja Eselon IV	3	
	Meja Kerja	28	
	Genset	5	
	Pompa Air	6	
5	Alat Laboraturium		
	Stetoscope	24	
	Tabung Oksigen	9	
	Cawang Petri	30	
	Gelas Ukur	14	
	Gelas Objek	5	
	Sumbat Erlemeyer	12	
6	Alat Kedokteran		
	Alat Kedokteran Umum	2	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	Gedung Kantor Dinas	1	
2	BBI	4	
3	Puskesmas	2	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1	Induk Pasang Surut	1	
5	Aset Lainnya		
1	Buku Laporan	3	
2	Binatang Ikan	14	
	Jumlah	466	

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015 - 2019

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi kinerja pelayanan dan penganggaran sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Peningkatan Administrasi Perkantoran																		
	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang efektif												-	-	-		-	
	Prosentase kelengkapan Administrasi Kepegawaian Pertahun (%)	58%	67%	63%	62%	58%		67%	86,59%	69,65%	89%		100,00	137,44	112,34	153,45		
	Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan												-	-	-		-	
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	A	CC	B	BB	A		CC	CC	CC	CC		-	-	-		-	
	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD yang tepat waktu	Januari	Januari	Januari	Januari	Januari		Januari	Januari	Januari	Januari		-	-	-		-	
	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%					100%					98%					-	98,00
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					100%					98%					-	98,00

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					-					-				-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC					CC					CC				-	-
Meningkatnya produksi sektor peternakan																-	-
	Sapi (Ekor)	73.091	54.944	60.428	66.485	73.091		54.950	60.433	64.064	36.063		100,01	100,01	96,36	49,34	-
	Kerbau (Ekor)	3.329	2.850	3.001	3.161	3.329		2.853	3.004	3.158	1.602		100,11	100,10	99,91	48,12	-
	Kuda (Ekor)	1.138	565	571	579	586		599	579	215	293		106,02	101,40	37,13	50,00	-
	Kambing (Ekor)	15.083	12.664	13.424	14.229	15.083		12.726	13.489	4.974	6.273		100,49	100,48	34,96	41,59	-
	Ayam ras pedaging (Ekor)	3.668.330	2.912.039	3.145.002	3.396.602	3.668.330		2.757.386	3.148.932	4.092.200	3.586.578		94,69	100,12	120,48	97,77	-
	Ayam buras (Ekor)	2.282.474	1.663.924	1.886.324	2.074.976	2.282.474		1.714.855	1.886.342	963.767	660.394		103,06	100,00	46,45	28,93	-
	Ayam ras petelur (Ekor)	5.407.806	4.540.498	4.812.928	5.101.703	5.407.806		5.889.408	5.997.751	4.834.545	5.237.873		129,71	124,62	94,76	96,86	-
	Itik (Ekor)	678.138	538.327	581.394	627.905	678.138		438.527	581.607	583.551	1.313.151		81,46	100,04	92,94	193,64	-
	Ekor hasil IB						3.708					3.708					100,00
	Produksi daging sapi (Kg)	750.094	723.740	732.425	741.214	750.108		1.091.672	880.595	916.379	718.189		150,84	120,23	123,63	95,74	-

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (Rp.000)	871.898.560	681.396.880	739.528.155	802.865.775	871.889.560		710.129.555	766.871.670		756.045.850		104,22	103,70	-	86,71	-
	Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	2,7	3	3	3	3		3,93	3,17		2,54		151,74	120,08	-	94,07	-
	Cakupan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	15%	12%	13%	14%	15%		9%	47,50%		2,09		75,00	365,38	-	1.393,33	-
	Terkendalinya Penyakit Menular Ternak 0,4 - 0,6% untuk mendukung pengembangan populasi ternak						7140					7140					
	Jumlah Kelompok Hasil produksi Peternakan (Klp)	11	2	1	1	1	2	2	1	1	0	2	100,00	100,00	100,00	-	100,00
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Sub Sektor Peternakan																-
	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	5,22					5,22					5,41				-	103,64

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya produksi sektor perikanan																
	Produksi perikanan budidaya (Ton)	806,8	697	731,8	763,39	806,8		641,44	708,79	724,00	527,89		92,03	96,86	94,84		-
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	44,49	41,94	42,77	40	40		40,08	40				95,57	93,52	-		-
	Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Budidaya (Rp 000)	13.556.080	11.710.253	12.295.765	12.910.553	13.556.080					20.331.990		-	-	-		-
	Cakupan Bina Kelompok Budidaya	37,34%	37,34%	37,34%	2%	8,9%		13,46 %	10,17 %	10,17%	2,81%		36,05	27,24	508,50		-
																	-
	Produksi perikanan tangkap	6.944,0	3.076,7	3.230,5	3.295,1	3.361,0		2.320,40	3.219,90	3.276,00	2.536.300,00		75,42	99,67	99,42		-
	Kontribusi Sub sektor Perikanan terhadap PDRB Tangkap (Rp 000)	64.330.268	55.570.905	58.349.450	59.516.439	60.706.767		49.703.099	67.785.516	67.785.516	97.853.500		89,44	116,17	113,89		-
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	68%	68%	68%	8,5%	11,7%		112%	68%		-		164,71	100,00	-		-

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Jumlah Ikan yang ditebar	4.128.450	3.345	3.624.790	240.000	300.000		922.000	625.000	240.000	-		27.563,53	17,24	100,00		-
	Sarana dan prasarana penyuluhan perikanan	6	1	1	1	1		-	1				-	100,00	-		-
	Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan(Paket)	1	1	1	1	1		11	5				1.100,00	500,00	-		-
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Sub Sektor Perikanan																	-
	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	0,63					0,63					0,64					101,59

Tabel 2.6 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 - 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN																	
Pendapatan Asli Daerah	130.000.000	35.000.000	163.310.000	163.310.000	163.310.000	17.500.000	9.730.750	112.702.000	115.667.700	114.291.300	13,46	27,80	69,01	70,83	69,98	130.986.000	73.978.350
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tdk Langsung	3.437.990.000	7.583.314.000	13.746.423.000	12.446.423.000	12.790.745.000	3.345.021.102	7.438.150.817	12.676.549.500	12.112.422.716	12.607.990.007	97,30	98,09	92,22	97,32	98,57	10.000.979.000	9.636.026.828
Belanja Langsung	39.000.676.000	23.450.624.000	19.341.644.000	13.371.965.000	19.789.774.000	34.991.868.899	17.427.413.015	16.626.064.986	9.610.994.071	19.038.834.717	89,72	74,32	85,96	71,87	96,21	22.990.936.600	19.539.035.138

2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2016-2019 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016-2019

No	Target/ Indikator	Satuan	Capaian TPB/SDGs			
			2016	2017	2018	2019
14	Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan					
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	persen	52	54	55	58
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	orang	-	-	156	18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Ketersediaan bibit unggul bermutu belum cukup;
- b. Rendahnya minat generasi muda untuk menjalankan usaha peternakan dan perikanan;
- c. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan petani baik formal maupun informal;

- d. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi peternakan dan perikanan;
- e. Belum optimalnya dan belum sepenuhnya dipahami tentang keadilan dan kesetaraan gender untuk diterapkan.

2. Peluang

- a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik;
- b. Komitmen pemerintah kabupaten dalam pengembangan peternakan dan perikanan;
- c. Adopsi teknologi peternakan oleh peternak semakin meningkat;
- d. Masih terbuka peluang pasar produk peternakan dan perikanan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;
- e. Adanya kelembagaan peternakan dan perikanan baik formil maupu informal
- f. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan HMT
- g. Semakin terbukanya peluang usaha di bidang perikanan
- h. Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) pada BBI dan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) pada kelompok pembudidaya ikan
- i. Potensi SDA untuk pengembangan usaha perikanan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang perikanan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya kualitas DOC - Adanya penyakit ternak - Mahalnya pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Vaksinasi dan biosecurity yang kurang memenuhi SOP
2	Fluktuasi harga komoditas peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Naiknya biaya produksi (terutama biaya pakan) - Permintaan dan penawaran tidak bisa diprediksi - Banyaknya kasus ternak sakit sehingga menurunkan kualitas produksi - Distribusi produk peternakan yang kurang lancar akibat pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pandemi Covid-19

3	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	Rendahnya kualitas genetik, produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, kualitas sumberdaya manusia serta kurangnya sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya status kesehatan hewan - Kurangnya kebun bibit dan pakan unggul - Rendahnya tingkat pengetahuan perbibitan dan budidaya ternak dari peternak - Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana kesehatan ternak - Tingginya angka kejadian penyakit menular strategis - Kurangnya tenaga medis dan paramedis veteriner
4	Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif serta perlindungan sumber daya ikan	Belum adanya Perbup tentang Perlindungan Pemotongan Betina Produktif serta Perlindungan Sumber Daya Ikan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Perda No. 4 Tahun 2010 (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Perairan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) dan Perda No 4 Tahun 2016 (Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif)
5	Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan	Kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan	Kurangnya bimbingan teknis, pelatihan dan magang bagi SDM peternak, pembudidaya dan nelayan
6	Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan	Kurangnya informasi kepada peternak, pembudidaya dan nelayan tentang sumber permodalan	Terbatasnya pembinaan dan pendampingan bagi peternak, pembudidaya dan nelayan tentang permodalan
7	Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya perubahan lingkungan dan ekosistem danau yang menyebabkan menurunnya produksi ikan di danau - Beberapa spesies ikan endemic menjadi langka bahkan sudah ada yang punah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya sedimentasi tiap tahun menyebabkan danau semakin dangkal - Adanya alih fungsi lahan di pesisir danau yang menyebabkan luasan danau semakin sempit - Adanya spesies baru di danau yang merupakan hama bagi spesies ikan di danau yaitu ikan sapu-sapu

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu aspek arahan RPJMD, pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi Perikanan	Melampaui (>)	Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
2	Konsumsi Ikan	Sesuai(=)	Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan	Ketersediaan ikan dan pola konsumsi masyarakat
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya alokasi anggaran untuk kelompok nelayan	Alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Belum Tercapai (<)	Minimnya sarana penangkapan ikan yang memadai	Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai
			Adanya spesies baru (ikan sapu-sapu) yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan	Penanganan yang tepat terhadap ikan sapu-sapu
			Menurunnya produktifitas danau	Penanganan pencemaran dan sedimentasi di danau serta peningkatan kegiatan restocking
II	Pertanian			
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya pengadaan vaksin, obat-obatan dan biaya operasional petugas	1. Vaksinasi Massal 2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
2	Produksi daging	Belum Tercapai (<)	Adanya beberapa kasus penyakit	Peningkatan manajemen kesehatan (biosecurity)
			Belum maksimalnya program IB	Peningkatan tingkat adopsi peternak terhadap teknologi IB

			Menurunnya jumlah populasi ternak	Peningkatan pemanfaatan lahan penggembalaan dan HMT
			Pemotongan betina produktif	Sosialisasi pelarangan pemotongan betina produktif
			Sistem pemeliharaan belum intensif	KIE cara pemeliharaan secara intensif
3	Produksi telur	Belum Tercapai (<)	Jumlah dan kualitas DOC rendah	Memaksimalkan manajemen indukan/parentstock
			Biaya produksi tinggi	Penyediaan pakan yang berkualitas oleh pabrik pakan lokal
			Kualitas pullet belum maksimal	Peningkatan manajemen pemeliharaan
			Adanya penyakit ternak	Peningkatan manajemen kesehatan/biosecurity

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa ada 1 indikator yang melampaui target, 1 indikator yang memenuhi target dan 5 (lima) indikator yang belum mencapai target.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”*** yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam **misi 2 (dua)** yaitu: ***“Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”***. Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut serta adanya perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi setiap aspek kajian, dari sisi permasalahan berdasarkan pelayanan perangkat daerah, arahan RPJM, arahan RTRW dan arahan KLHS.

Telaahan terhadap visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Sidenreg Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang :				
"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera"				
No.	Misi, Program, dan Sasaran Kepala/Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi II: <i>Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat</i>			
1	Program Penguatan Ekonomi Lokal Kerakyatan (UKMK) Sasaran:			
	1. Menyiapkan bantuan temak (Sapi, kambing dan unggas) untuk masyarakat	Rendahnya Pengendalian lalu lintas temak antar kabupaten	Pelaku usaha yang belum sepenuhnya kooperatif	Peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang mendukung
		Kurangnya sistem pemeliharaan temak yang intensif	Anomali cuaca yang dapat memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguan kesehatan temak	Dukungan anggaran dari Pemda, Propinsi dan Pusat
		Kurang optimalnya penerapan teknologi peternakan	Masih rendahnya SDM pelaku usaha	Penerapan teknologi untuk memudahkan pengembangan peternakan
2	Program : Pertanian Modern Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Sasaran:			
	1. Membangun Kolam ikan desa dan embung-embung (Program 1000 Embung-embung)	Terbatasnya sarana dan prasarana produksi Perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Pola budidaya perikanan masih tradisional	Pengembangan usaha perikanan dari pemerintah pusat.
		Infrastruktur irigasi primer dan sekunder yang belum optimal	Kurangnya ketersediaan air akibat kemarau yang berkepanjangan	komitmen pimpinan SKPD terkait dan jajarannya dalam meningkatkan produksi

			Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur pengairan	Peningkatan prasarana pertanian berupa irigasi
--	--	--	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis terhadap RenstraK/L dan RenstraProvinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Sasaran strategis yang termuat dalam Renstra K/L dan Renstra Provinsi telah sinergi dengan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 adalah: **“Pertanian Yang Maju, Mandiri dan Modern Untuk Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan misi: (1). Mewujudkan ketahanan pangan; (2). Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan (3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan pembangunan pertanian yang ingin dicapai antara lain yaitu: (1). Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan; (2). Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; (3). Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1). Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2). Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; (3). Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional ; (4). Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; (5). Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; (6). Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (7). Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan Pertanian Nasional; (8). Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dan (9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Hasil telaahan Renstra Kementerian Pertanian dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran. Dukungan teknologi masih belum optimal	- Dampak perubahan iklim (bencana alam, banjir dan kekeringan).	- Regulasi dalam mendukung pembangunan, peternakan dan perikanan.
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional		- Laju alih fungsi lahan makin meningkat.	- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional		- Menurunnya kualitas lahan pertanian.	- Komitmen pimpinan OPD dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian		- Infrastruktur pertanian yang belum optimal.	- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan		- Menurunnya minat generasi muda terhadap usahatani	- Ketersediaan dukungan anggaran pembangunan.
6.	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan		- Daya saing produk pangan dan hortikultura masih rendah.	- Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat
7.	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima		- Kelembagaan dan SDM pertanian belum optimal diberdayakan	
8.	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas		- Kemampuan permodalan petani terbatas.	

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 – 2024 adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan

dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah: (1). Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat; (2). Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat; (3). Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan; (4). Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat; (5). Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan; (6). Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan bertanggungjawab; (7). Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing; (8) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan integratif dan (9). Tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perikanan dan Kelautan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	- Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran	- Sarana dan Prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional	- Sumberdaya air memiliki Potensi cukup Besar
2.	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat		- Mata Pencaharian nelayan bergantung pada perairan umum	- Potensi Kelembagaan
3.	Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan	- Dukungan teknologimasih belum optimal	- Pola budidaya masih tradisional	- Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat
4.	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	- Kurangnya data dan informasi	- Kualitas SDM	
5.	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan			
6.	Tata kelola sumberdaya kelautan dan perikanan bertanggung jawab			
7.	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing			
8.	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan integratif			

9.	Tata kelola pemerintahan yang baik			
----	------------------------------------	--	--	--

Adapun telaahan terhadap Renstra Provinsi dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak	Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal	Ketersediaan sarana produksi yang kurang	Adanya regulasi yang mendukung peternakan
		Ketersediaan anggaran	Infrastruktur yang belum optimal	Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota
		Ketersediaan SDM yang terampil di bidang peternakan	Keterampilan petugas dan peternak yang masih kurang	Adanya Kelembagaan Peternakan
2	Meningkatnya kesejahteraan peternak			
3	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi	Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal	Ketersediaan sarana produksi yang kurang	Adanya regulasi yang mendukung perikanan
		Ketersediaan anggaran	Infrastruktur yang belum optimal	Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota
		Ketersediaan SDM yang terampil di bidang perikanan	Keterampilan petugas dan nelayan yang masih kurang	Adanya kelembagaan perikanan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Mengacu pada RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2032, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang akan memperhatikan rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Kabupaten meliputi: (a). Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan (b). Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi kawasan andalan darat, dan kawasan andalan laut. Sedangkan untuk bidang Peternakan dan Perikanan terfokus pada kawasan andalan darat meliputi :

- a. Pengembangan Komoditas Unggulan di seluruh kecamatan.
- b. Pengolahan Kawasan Andalan peternakan dan perikanan serta pengolahannya..
- c. Pengembangan Bioteknologi penunjang budidaya ternak

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan peternakan dan perikanan.

- Untuk kawasan peternakan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan dan kegiatan penelitian.
- Untuk kawasan perikanan, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan dengan permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	- Belum optimalnya perlindungan lahan berkelanjutan	- Adanya UU No. 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			- Masyarakat masih menganggap sektor properti masih mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding kawasan budidaya pertanian	- Penegakan hukum bagi pelaku alih fungsi lahan agar ditindak tegas sesuai dengan aturan - Potensi SDA dan SDM tersedia untuk pengembangan kawasan pertanian

Berdasarkan hasil analisa kajian KLHS terhadap pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan kerusakan struktur tanah	* Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai teknologi pertanian yang ramah lingkungan	* Penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara tidak bijaksana	* Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Penurunan kualitas tanah akibat limbah pertanian	* Minimnya anggaran yang mendukung program/kegiatan pertanian organik	Perilaku petani dalam pengelolaan lahan yang tanpa disadari telah menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup, misalnya pembakaran lahan pertanian untuk pertanaman baru	* Penerapan secara optimal teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Kerjasama seluruh stakeholder sektor pertanian

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan peternakan dan perikanan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) harga sarana produksi peternakan dan perikanan; 3) kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan; 4) terbatasnya permodalan. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh peternak dan pembudidaya di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi peternakan dan perikanan. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas peternakan dan perikanan strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

Selain itu, sebagian besar produksi peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong peternak dan pembudidaya agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Harga Sarana Produksi Peternakan dan Perikanan

Pendapatan petani ternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya keuntungan dan pendapatan.

3. Kelembagaan Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan

Kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

4. Terbatasnya Permodalan

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk mendukung usaha ternak, budidaya perikanan ataupun perikanan tangkap sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas maupun kuantitas. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani ikan, peternak dan nelayan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani, peternak dan nelayan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan pembangunan Peternakan dan Perikanan periode 5 (lima) tahun kedepan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan
2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan

Berdasarkan uraian di atas tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka harus diselaraskan antara keduanya. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	RPJMD		Renstra PD	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan dan perikanan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan di uraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan		Laju Pertumbuhan PDRB subsektor Peternakan (%)	-	-	-	5,83	6,04
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Kontribusi subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	5,22	5,62	5,62	5,83	6,04
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai sakiP	50 (CC)	60 (B)	70 (BB)	80 (A)	80 (A)
	Meningkatkan produktivitas sub sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan (%)	-	-	86,15	1,24	1,26
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	0,63	0,65	1,21	1,24	1,26

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di pedomani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

VISI: "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera"			
MISI II: Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas sektor – sektor perekonomian daerah	1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	Pemenuhan sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan
	2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan		Penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan
			Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama kurun waktu 2018–2023 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
- b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

III. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatannya adalah :

1. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Miroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- b. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

V. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatannya adalah :

- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

VI. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatannya adalah :

1. Penjaminan Ketersediaan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

2. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

VII. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Keegiatannya adalah :

- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

VIII. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Keegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

IX. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

6. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan produktivitas subsektor Perikanan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	0	-	-	-	86,15	1.941.970.000	
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan			Kontribusi Subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,2	0,63	0,65		1,21	1.941.970.000	
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap			100	2.017.000.000	100%	831.222.000	
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap			1.796,28	2.017.000.000	2.691,52	805.338.000	
		3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit)					2	79.815.000	
		3.25.03.2.01.02	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap (Unit)					515	725.523.000	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil					100%	25.884.000	
		3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)					40	25.884.000	
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya			100	3.983.000.000	100%	984.742.000	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya			581,99	3.983.000.000	611,09	984.742.000	
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan					6	395.700.000	
				Waktu penyediaan jasa tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					6		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan						9	589.042.000
		3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan						65%	126.006.000
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan						273	126.006.000
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap						4	126.006.000
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (%)	-1,18	-				0	789.650.000
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan			Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	4,03	5,22			5,62	5,62	789.650.000
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging						7.008.698	469.815.000
				Jumlah Produksi telur						76.814.736	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani							
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak Yang Lahir dari IB							
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar							
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak							
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak							
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis							
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal (Dosis)							

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Pesyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet						-	-
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet						-	-
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan						57.14%	109.835.000
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan						100%	109.835.000
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan Yang Diterbitkan						50	60.000.000
		3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Diawasi						4	49.835.000

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Ketersediaan Penyuluh Peternakan dan Rumah Tangga Peternak						1:14	60.000.000
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh						100%	60.000.000
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pertemuan Penyuluh						4	43.000.000
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan						1	17.000.000
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (%)	-1,18	-				0	7.419.765.000

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip	60(B)	50 (CC)		60(B)		70(BB)	7.419.765.000
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100%	7.419.765.000
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah						100%	14.816.000
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun						2	11.427.000
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun						1	713.000
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun						1	163.000

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun					1	834.000	
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun					1	711.000	
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Yang Disusun					5	968.000	
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	6.990.190.000	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	6.988.639.000	
		1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun					1	1.557.000	
		1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	261.239.000	
		1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai					400	2.600.000	

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik						12	57.654.000
		1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	5.100.000
		1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor						12	195.885.000
		1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%	114.614.000
		1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan						28	1.734.000
		1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						80	75.187.000
		1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						84	37.693.000

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2019		2020		2021	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	38.900.000	
		1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Secara Rutin/Berkala					8	26.800.000	
		1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara					1	10.000.000	
		1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala					6	2.100.000	
JUMLAH										10.151.385.000	

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan produktivitas subsektor Perikanan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (%)	0	1,24	958.635.000	1,26	968.221.350	1,26	3.868.826. 350		
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan			Kontribusi Sektor perikanan terhadap PDRB (%)		1,24	958.635.000	1,26	968.221.350	1,26	3.868.826. 350		
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		100	495.338.000	100	500.291.380	100	1.826.851. 380		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Perikanan Tangkap		2.745,37	442.320.000	2.800,28	446.743.200	10.033,45	1.694.401. 200		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.25.03 .2.01.0 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit)		2	79,000,000	2	79.790.000	2	238.605.000		
		3.25.03 .2.01.0 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap (Unit)		515	363.320.000	515	366.953.200	515	1.455.796. 200		
		3.25.03 .2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil		100%	53.018.000	100%	53.548.180	100%	132.450.180		
		3.25.03 .2.02.0 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan (orang)		40	53.018.000	40	53.548.180	40	132.450.180		
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya		100%	425.382.000	100%	429.635.820	100%	1.839.759. 820		
		3.25.04 .2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Perikanan Budidaya		641,64	425.382.000	673,72	429.635.820	2.508, 44	1.839.759. 820		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan		11		12		12			
				Waktu penyediaan jasa tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		12	210.712.000	12	212.819.120	12	819.231.120		
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan		10	214.670.000	10	216.816.700	10	1.455.796.200		
		3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		70%	37.915.000	75%	38.294.150	75%	202.215.150		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		294	37.915.000	294	38.294.150	294	202.215.150		
		3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap		4	37.915.000	4	38.294.150	4	202.215.150		
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (%)	-1,18	5,83		6,04		6,04	6.944.454.920		
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan			Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)		5,83	3.062.092.000	6,04	3.092.712.920	6,04	6.944.454.920		
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging		5.127.388	1.500.757.000	5.358.011	1.515.764.570	17.494.097	3.486.336.570	-	-
				Jumlah Produksi Telur		80.005.124		83.362.100		240.181.960			

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Akseptor Yang Dilayani		10%	238.755.000	10%	241.142.550	10%	579.897.550	Peternakan	11 Kec.
		3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak Yang Lahir dari IB		4.216	238.755.000	4.532	241.142.550	4.532	579.897.550		
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ternak Yang Disebar		100%	1.262.002.000	100%	1.274.622.020	100%	2.906.439.020		
		3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak		2.000	1.156.197.000	2.000	1.167.758.970	2.000	2.693.770.970		
		3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Luas Kebun Hijauan makanan Ternak yang Ditanami		1	105.805.000	1	106.863.050	1	212.668.050		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)		100%	1.198.825.000	100%	1.210.813.250	100%	2.409.638.250		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)		100%	1.198.825.000	100%	1.210.813.250	100%	2.409.638.250		
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara		2	1.198.825.000	2	1.210.813.250	2	2.409.638.250		
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		21%	362.510.000	21%	366.135.100	21%	878.645.100		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis		20%	267.510.000	20%	270.185.100	20%	687.695.100		
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal (Dosis)	11	8.500	267.510.000	5.000	270.185.100	5.000	687.695.100	Peternakan	11 Kec.
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet		50%	95.000.000	75%	95.950.000	0,75	190.950.000		
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha hewan dan Produk Hewan yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet		4	95.000.000	4	95.950.000	4,00	190.950.000		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan		71.43%	13.665.000	100%	13.801.650	100%	137.301.650	Peternakan	11 Kec.
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	60	100%	13.665.000	100%	13.801.650	100%	137.301.650	Peternakan	11 Kec.
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan Yang Diterbitkan		50	13.665.000	75	13.801.650	75	87.466.650		
		3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Diawasi			0	0	0	0	49.835.000		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak		1 : 13	67.168.000	1 : 13	67.839.380	1 : 13	195.007.380		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh		100%	67.168.000	100%	67.839.380	100%	195.007.380	Peternakan	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pertemuan Penyuluh		4	45.758.000	4	46.215.280	4	134.973.280	Peternakan	11 Kec.
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan		1	21.410.000	1	21.624.100	1	60.034.100		

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan produktivitas subsektor Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (%)	-1,18	3,74		3,6		3,6	23.057.121.575		
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip	60(B)	80 (A)		80(A)		80(A)	23.057.121.575		
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	7.779.779.390	100	7.857.577.185	100	23.057.121.575		
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100,00	18.548.850	100,00	18.734.339	100,00	52.099.189	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun		2	14.841.270	2	14.989.683	2	41.257.953	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun		1	720.130	1	727.331	1	2.160.461	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Yang Disusun		1	422.000	1	426.220	1	1.011.220	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun		1	842.340	1	850.763	1	2.527.103	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Yang Disusun		1	718.110	1	725.291	1	2.154.401	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Ysng Disusun		5	1.005.000	5	1.015.050	5	2.988.050	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.089.649.390	100%	7.160.545.884	100%	21.240.391.274	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	7.058.525.390	12	7.129.110.644	12	21.176.275.034	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng
		1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun		1	31.124.000	1	31.435.240	1	64.116.240	Sekretariat	Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	363.766.000	100%	367.403.660	100%	992.408.660		Pangkajene Sidenreng
		1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Yang Bermaterai		1.200	3.000.000	1.200	3.030.000	1.200	8.630.000		Pangkajene Sidenreng
		1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		12	84.000.000	12	84.840.000	12	226.494.000		Pangkajene Sidenreng
		1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	5.000.000	12	5.050.000	12	15.150.000		Pangkajene Sidenreng
		1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor		12	271.766.000	12	274.483.660	12	742.134.660		Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	233.215.150	100	235.547.302	100,00	583.376.452		Pangkajene Sidenreng
		1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan		28	3.468.000	28	3.502.680	28	8.704.680		Pangkajene Sidenreng
		1.6.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		40	104.747.150	40	105.794.622	40	285.728.772		Pangkajene Sidenreng
		1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		160	125.000.000	160	126.250.000	160	288.943.000		Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.9	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	74.600.000	100%	75.346.000	100%	188.846.000		Pangkajene Sidenreng
		1.9.1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Secara Rutin/Berkala		8	61.000.000	8	61.610.000	8	149.410.000		Pangkajene Sidenreng
		1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara		1	10.100.000	1	10.201.000	1	30.301.000		Pangkajene Sidenreng

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala		22	3.500.000	22	3.535.000	22	9.135.000		Pangkajene Sidenreng
JUMLAH							11.881.339.390		12.000.152.485		34.032.876.875		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauhmana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023 seperti tercantum pada tabel di berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2018)	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERTANIAN							
1.	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB (%)	4,80	5,22	5,62	5,62	5,83	6,04	6,04
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB (%)	0,63	0,63	0,65	1,21	1,24	1,26	1,26

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2018 – 2023 merupakan acuan kerja bagi Dinas Peternakan dan Perikanan hingga tahun 2023 dan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Sasaran, program dan kegiatan dalam perubahan renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian dan rencana strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2021

KEPALA DINAS

Ir. SEMUEL K

NIP. 19640317 199510 1 002

